

***THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS (SIPKD) AND HUMAN RESOURCES COMPETENCE
ON APBD ACCOUNTABILITY IN KABUPATEN BANDUNG BARAT***

**PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PENGELOAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS APBD DI KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

Alya Sahira¹, Nunung Aini Rahmah²

Universitas Jenderal Achmad Yani^{1,2}

alyasahira3@gmail.com¹, nunung.aini@lecture.unjani.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the Effectiveness of the Regional Financial Management Information System for APBD Accountability in West Bandung Regency with Human Resource Competence. This study uses quantitative data. The analysis technique used in this study was a purposive sampling technique, with 31 samples from 31 populations that were directly related to financial reports. All respondents filled out research questionnaires via googleform. The results of the study show: (1) The effectiveness of the regional financial management information systems have a positive and significant effect on the accountability of the West Bandung Regency APBD. (2) The competence of human resources has a positive and significant effect on the accountability of the West Bandung Regency APBD. (3) The effectiveness of the regional financial management information systems and human resource competencies have a partial or simultaneous effect on the accountability of West Bandung Regency APBD.

Keywords: *The Effectiveness of the Regional Financial Management Information System (SIPKD), Competence of Human Resources (HR), APBD Accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, dengan 31 sample dari 31 populasi yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Seluruh responden mengisi kuisioner penelitian melalui *googleform*. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Efektivitas Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat. (2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat. (3) Efektivitas Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Akuntabilitas APBD

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi setiap individu, atau organisasi. Dengan adanya teknologi atau pengaplikasian suatu sistem informasi diharapkan para pengguna dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien (Dewi & Mimba, 2016).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dibutuhkan pemerintah daerah selaku salah satu alat untuk melakukan monitoring serta evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdapat pada pemerintahan daerah. Dengan adanya SIPKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan PP yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban (Erniati, 2019). Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terkait dalam penggunaan anggaran diwajibkan untuk dapat dilakukan pengukuran dan dinyatakan keterkaitannya. Mardiasmo (2002:20) menjelaskan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, setiap kegiatan harus memiliki indikator yang jelas sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya bagi masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) terhadap aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan (Manullang, 2019)

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sriwijayanti, 2018)

Berpedoman kepada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menerapkan SIPKD terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal ini fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah defisit anggaran KBB berdampak pada tertundanya berbagai kegiatan dan program pembangunan, bahkan berdampak pada gaji tenaga honorer yang hanya teranggarkan selama sembilan bulan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan, krisis keuangan yang dialami Pemda KBB terjadi dalam tiga tahun terakhir secara terus menerus. Pandemi Covid-19 jadi salah satu pemicu sehingga membuat Pemda harus melakukan *refocusing* APBD. Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat kemudian ada koreksi Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi pada 2020. Pada 2021, kondisi keuangan tidak kunjung membaik, sehingga membuat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk KBB dikurangi 8 persen untuk penanganan Covid-19 serta koreksi DBH dari Pemprov Jabar. Kondisi ini diperburuk dengan kinerja Pemerintah KBB yang menurutnya kurang cermat dalam membuat perencanaan anggaran. Dalam perencanaan APBD tahun ini diasumsikan ada potensi penambahan anggaran untuk gaji PPPK dari DAU. Namun pada kenyataannya DAU dari pemerintah pusat tersebut tidak turun. Sehingga otomatis dalam perjalanannya hal tersebut harus dicover oleh APBD. Padahal realisasi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata yang selama ini jadi andalan di masa pandemi Covid-19 belum optimal (Haryanto, 2022)

Sumber pendapatan merupakan salah satu hal terpenting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini merupakan data mengenai perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1. Perbandingan DAU dan PAD pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2021

Tahun	PAD	DAU
2017	Rp. 609.916.387.808,09	Rp. 1.088.131.606.000,00
2018	Rp. 422.341.026.545,00	Rp. 1.091.118.868.000,00
Tahun	PAD	DAU
2019	Rp. 528.087.033.271,00	Rp. 1.126.707.364.000,00
2020	Rp. 464.808.559.257,00	Rp. 1.022.493.222.000,00
2021	Rp. 644.474.574.010,00	Rp. 1.044.339.297.000,00
2022	Rp. 751.292.293.903,00	Rp. 1.012.676.514.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan diatas, terdapat data mengenai PAD dan DAU Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Dari data tabel tersebut terlihat kenaikan dan penurunan selama lima tahun terakhir. Berikut ini merupakan selisih DAU antara tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar Rp. 31.662.783.000,00, dimana berdasarkan data tabel berikut dapat terlihat bahwa DAU mengalami defisit seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Banggar DPD KBB, Bagja Setiawan. Berikut ini merupakan grafik mengenai DAU dan PAD pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Perbandingan PAD dan DAU

Sumber: Pengolahan Data 2022

Terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Bandung Barat (KBB)

disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan berperan sangat penting, sehingga kualitas sumber daya manusia harus terjamin pengelolaannya karena akan memberikan kontribusi yang baik untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan modul Aplikasi Dari Departemen Dalam Negeri aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD (Yusup, 2016)

Dalam hal ini efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah aplikasi yang membantu sumber daya manusia di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merumuskan kebijakan keuangan daerah yaitu pengendalian defisit anggaran dan untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara komprehensif mengenai posisi keuangan daerah. Sehingga jika SIPKD dapat mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan meningkatkan akuntabilitas.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi pegawai negeri sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Sumber daya manusia adalah sesuatu sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu manajemen dalam organisasi.

Sumber Daya Manusia merupakan perangkat pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintah agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini pengaruh sumber daya manusia terhadap akuntabilitas APBD adalah bagaimana sumber daya manusia itu sendiri dalam pembuatan laporan keuangan, laporan anggaran, harus sesuai dengan Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan dan diharapkan dalam lingkungan pemerintahan agar dapat bekerja secara terstruktur sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Akuntabilitas APBD

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Halim, 2006 dalam Sriwijayanti, 2018).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember (Bastian, 2006 dalam (Sriwijayanti, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis, Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Subjek penelitian ini adalah Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan pendekatan survei dimana proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menafsirkan data untuk memberikan keadaan yang nyata sehingga hubungan antar variabel dapat dipahami (Sugiyono, 2018). Selain itu penelitian ini menggunakan teknik analisis asosiatif dengan hubungan kausal yaitu sebab akibat untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi (*independen*) dan variabel yang dipengaruhi (*dependen*). Dengan metode kuisioner melalui online yaitu *google formulir* yang disebar kesetiap responden yang kemudian diolah menggunakan *Software Microsoft Excel 2016* dan program *IBM Software Statistical for Social Science (SPSS) Statistics Processor Ver.22*. Penelitian dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang berkaitan langsung dengan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bandung Barat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi (R^2), uji t-test, dan uji f-test.

Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu: keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau *output*, dan relevansi (Menurut Bodnar, 2000: 88-90 dalam (Ulfa & Hariani, 2016). Variabel ini diukur dengan skala likert dengan ketentuan skor 1 sampai 5 yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak

Setuju, 3) Kurang Setuju, 4) Setuju, Dan 5) Sangat Setuju.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia tercantum dalam Peraturan Kepala Kadan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi pegawai negeri sipil, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Herawati, 2018). Variabel ini diukur dengan skala likert dengan ketentuan skor 1 sampai 5 yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Kurang Setuju, 4) Setuju, Dan 5) Sangat Setuju.

Akuntabilitas APBD

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas APBD, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan (Superdi, 2017). Variabel ini diukur dengan skala likert dengan ketentuan skor 1 sampai 5 yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Kurang Setuju, 4) Setuju, Dan 5) Sangat Setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuisioner yang disebarkan ke pegawai bagian keuangan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah responden sebanyak 31 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	f	%
Bagian/Jabatan	Kepala Badan/Dinas	1	3
	Bagian Keuangan/Bendahara	19	62
	Staff/Pelaksana	11	35
Jenis Kelamin	Laki-Laki	20	65
	Perempuan	11	35
Usia	20-25	1	3
	26-30	8	16
	31-35	6	19

Pendidikan Terakhir	36-40	8	16
	> 41	8	26
	SLTA/Sederajat	7	23
	Diploma (D3)	3	10
	Strata 1 (Sarjana)	17	55
Masa Bekerja	Strata 2 (Master)	4	12
	Strata 3 (Doktor)		
	< 1 tahun	1	3
	1-5 tahun	10	32
	6-10 tahun	8	26
	> 10 tahun	12	39

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan data tabel di atas karakteristik bagian/jabatan yang menjadi responden terbanyak yaitu pada bagian keuangan/bendahara sebanyak 62%, bagian staff/pelaksana sebanyak 35% , dan bagian kepala badan/dinas sebanyak 3%. Berdasarkan data tabel di atas karakteristik jenis kelamin yang menjadi responden terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 65%, dan perempuan sebanyak 35%, hal ini menunjukkan bahwa pegawai SKPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah laki-laki. Berdasarkan data tabel di atas karakteristik usia yang menjadi responden terbanyak yaitu sebanyak 26% yang berusia > 41 tahun, 19% usia 31-35 tahun, 16% usia 26-30 dan 36-40 tahun, dan 3% usia 20-25 tahun. Berdasarkan data tabel di atas karakteristik pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu sebanyak berpendidikan Strata 1 (Sarjana) sebanyak 55%, berpendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 23%, berpendidikan Strata 2 (Master) sebanyak 12%, berpendidikan diploma (D3) sebanyak 10%, dan 0% berpendidikan Strata 3 (Doktor). Berdasarkan data tabel di atas masa kerja responden terbanyak yaitu >10 sebanyak 39%, 1-5 tahun sebanyak 32%, 6-10 tahun sebanyak 26%, dan < 1 tahun sebanyak 3%.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai standar deviasi semua variabel tidak lebih besar dari rata-rata responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

jawaban responden pada pernyataan variabel efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia tidak jauh berbeda antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan responden cenderung memberikan persepsi positif terhadap seluruh variabel bebas. Demikian pula pada variabel akuntabilitas APBD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki perbedaan yang besar.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam penelitian ini semua item kuisioner memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada $n = 31$ yaitu 0,355 maka dinyatakan valid. Dalam penelitian ini indeks validitas pada masing-masing item pernyataan variabel efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan akuntabilitas APBD yang diukur melalui nilai korelasi *product moment* yang memiliki nilai diatas nilai koefisien valid yaitu sebesar 0,355, maka dapat disimpulkan masing-masing pernyataan dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini memiliki tiga variabel yaitu efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X_1) sebesar 0,911, kompetensi sumber daya manusia (X_2) sebesar 0,926, dan akuntabilitas APBD (Y) sebesar 0,948, dari ketiga hasil setiap variabel menunjukkan nilai *alpha cornbach* lebih besar dari 0,60, hal ini menunjukkan bahwa butir kuisioner pada variabel efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat dapat mengukur variabelnya serta dapat dikatakan memiliki ketetapan yang tinggi untuk dijadikan variabel pada suatu penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Perhitungan	Ket.
Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	0,200	Normal
Uji Multikolinearitas <i>Tolerance & VIF</i>	Efektivitas SIPKD (X_1): $Tolerance = 0,339$ $VIF = 2,954$ Kompetensi SDM (X_2): $Tolerance = 0,339$ $VIF = 2,954$	$Tolerance Value > 0,10$ atau $VIF < 10$ (Tidak terjadi multikolinearitas)
Uji Heteroskedastisitas	Tidak terjadi heteroskedastisitas	Konstan
Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i>	DW = 2,173 $du < d < 4-du$ (1,570 < 2,173 < 2,430)	Tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif (terima)

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *signifikansi* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Hasil uji multikolinearitas variabel efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai *VIF* sebesar 2,954 dan nilai *tolerance* sebesar 0,339, dan variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai sebesar 2,954 dan nilai *tolerance* sebesar 0,339. Maka kedua variabel memiliki nilai *VIF* dibawah batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya dari sisi *tolerance* kedua variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dalam model tidak terdapat heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi, dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama konstan.

Hasil uji autokorelasi pada angka *durbin watson* sebesar 2,173. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil pengujian autokorelasi pada angka *Durbin Watson (DW)* sebesar 2,173 berada antara batas atas (*du*) dan (*4-du*). Berdasarkan tabel *Durbin Watson (DW)* pada $n=31$ dan $k=2$, diperoleh hasil; $du=1,570$ dan $dl=1,297$. Sehingga dapat disimpulkan $du < d < 4-du$ ($1,570 < 2,173 < 2,430$) artinya tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,173	2,843		-,764	,451
Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah	,236	,100	,266	2,357	,026
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,809	,129	,709	6,279	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas APBD

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas persamaan regresi dirumuskan dengan $Y = \alpha + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2$, persamaan regresi pada penelitian ini:

Akuntabilitas APBD = $(-2,173) + 0,236 \cdot x_1 + 0,809 \cdot x_2$. Persamaan regresi linier diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan.

Nilai *constant* adalah -2,173 artinya jika Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) nilainya 0 (nol), maka Akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat sebesar -2,173.

Nilai koefisien regresi dari variabel Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) sebesar 0,236 menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh yang positif terhadap

Akuntabilitas APBD (Y), artinya jika Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) meningkat 1% maka variabel Akuntabilitas APBD (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,236.

Nilai koefisien regresi dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) sebesar 0,809 menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas APBD (Y), artinya jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) meningkat 1% maka variabel Akuntabilitas APBD (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,809.

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 5. Analisis Koefisien Korelasi

Correlations				
		SIPKD	Kompetensi SDM	Akuntabilitas APBD
SIPKD	Pearson Correlation	1	,813**	,842**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	31	31	31
Kompetensi SDM	Pearson Correlation	,813**	1	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	31	31	31
Akuntabilitas APBD	Pearson Correlation	,842**	,925**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien korelasi variabel SIPKD (X_1) diperoleh sebesar 0,842 berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi nilai berada pada rentang “0,80 – 1,00” yang berarti tingkat hubungan X_1 terhadap Akuntabilitas APBD (Y) termasuk pada tingkat hubungan yang sangat kuat.

Selanjutnya nilai koefisien korelasi variabel Kompetensi SDM (X_2) diperoleh sebesar 0,925 berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi nilai berada pada rentang “0,80 – 1,00” yang berarti tingkat hubungan X_2 terhadap Akuntabilitas APBD (Y) termasuk pada tingkat hubungan yang sangat kuat.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)Tabel 6. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,938 ^a	,879	,871	2,98023

a. *Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi pada Adjusted R Square sebesar 0,871 atau 87,1%. Nilai koefisien determinasi sebesar 87,1% Akuntabilitas APBD (Y) dipengaruhi oleh variabel SIPKD (X1) dan Kompetensi SDM (X2). Sisanya 12,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penarikan Kesimpulan**Uji Parsial (t-Test)**

Tabel 7. Uji Parsial (t-Test)

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Beta</i>	<i>t</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
1	(Constant)	-2,173	2,843		-,764
	SIPKD	,236	,100	,266	2,357
	Kompetensi SDM	,809	,129	,709	6,279

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas APBD*

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada penelitian ini diperoleh nilai $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 31-2-1) = 0,025; 28 = 2,048$. Berdasarkan tabel diatas menunjukan pengujian hipotesis statistik T pada variabel SIPKD (X1) terhadap Akuntabilitas APBD (Y). Dapat diketahui bahwa nilai $sign\ 0,026 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,357 > t_{tabel} 2,048$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel SIPKD (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas APBD (Y).

Selanjutnya pengujian hipotesis statistik T pada variabel Kompetensi SDM (X2) terhadap Akuntabilitas APBD (Y). Dapat diketahui bahwa nilai $sign\ 0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6,279 > t_{tabel} 2,048$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Kompetensi SDM (X2) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Akuntabilitas APBD (Y).

Uji Simultan (f-Test)

Tabel 8. Uji Parsial (f-Test)

<i>ANOVA^a</i>					
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>
1	Regression	1811,804	2	905,902	101,996
	Residual	248,689	28	8,882	
	Total	2060,493	30		

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas APBD*

b. *Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada penelitian ini diperoleh nilai $f_{tabel} = f(k; n-k) = f(2; 31-2) = (2; 29) = 3,328$. Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai $sign\ 0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} 101,996 > 3,328$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel SIPKD (X1) dan Kompetensi SDM (X2) secara bersama-sama atau simultan berepengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas APBD (Y).

Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,357 sedangkan $t_{tabel} 2,048$ artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,357 > 2,048$ dan nilai $sign\ 0,026 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t bahwa variabel Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap Akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2019) yang menyatakan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi keuangan daerah maka sistem ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak seperti membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban, menyusun laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat, menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, dan menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna. Laporan penerapan sistem informasi keuangan yang akurat akan mempengaruhi informasi atau pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,279 sedangkan t_{tabel} 2,048 artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,279 > 2,048$ dan nilai $sign$ $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu instansi, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas,

maka akan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik, dan dapat mempertanggungjawabkan atas laporan rancangan anggaran yang dibuat dan digunakan.

Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 101,996 sedangkan f_{tabel} 3,328 artinya $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $101,996 > 3,328$ dan nilai $sign$ $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan antara Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas APBD Kabupaten Bandung Barat. Karena dalam penyusunan anggaran yang baik, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang baik dan memadai serta sistem pengelolaan keuangan daerah. kewajiban individu atau sumber daya manusia untuk melaporkan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia yang baik maka laporan dan pengelolaan keuangan dan anggaran yang dihasilkan lebih akurat, dan meningkatkan akuntabilitas.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat dalam kategori sangat baik dikarenakan telah berjalan dengan efektif dan efisien karena didukung oleh keamanan data yang baik, kecepatan dan ketepatan waktu yang baik, ketelitian yang baik, variasi laporan (*output*) yang baik, dan relevansi yang baik. Artinya efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu

membuat pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bandung Barat sangat baik dan akuntabel. Selain itu kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat dalam kategori sangat baik dikarenakan telah berjalan dengan efektif dan efisien karena didukung oleh pengetahuan yang baik, keterampilan yang bagus, dan sikap yang baik. Artinya kompetensi sumber daya manusia mampu membuat pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bandung Barat sangat baik dan akuntabel. Sehingga akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat dalam kategori sangat baik. hal ini dikarenakan adanya efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia yang baik, sehingga mengakibatkan akuntabilitas APBD di Kabupaten Bandung Barat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu didukung oleh faktor lain yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang baik.

Terdapat saran bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat mempertimbangkan untuk penambahan variabel independen lainnya yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas APBD, dan dapat melengkapi teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara atau teknik lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih luas dan pembahasan yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P. A. R., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 442–457. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8252>
- Erniati. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- Haryanto, A. (2022). *Ini Penyebab Anggaran Pemda KBB Defisit, DAU Gaji PPPK dari Pusat Tidak Turun*. <https://jabar.inews.id/berita/ini-penyebab-anggaran-pemda-kbb-defisit-dau-gaji-pppk-dari-pusat-tidak-turun>
- Herawati, P. (2018). Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas Pelayanan (studi tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan di kantor pemerintah kecamatan kutorejo kabupaten Mojokerto) Puri. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4.
- Indonesia, R. (2004). *Presiden republik indonesia*.
- Manullang, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Pergantian Kepala Skpd Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4.
- Sriwijayanti, H. (2018a). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal*

- EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7.
- Sriwijayanti, H. (2018b). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). 7(1), 89–101.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. CV. Alfabeta.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4.
- Ulfa, F., & Hariani, D. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang. 6.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 10(2), 149–160.